

## Analisis sengketa PPN atas tandan buah segar pada perusahaan perkebunan sawit terintegrasi : studi kasus PT ABCD = Analysis of VAT dispute on fresh fruit bunches in the integrated palm oil company : case study PT ABCD

Geny Pitaloka Hayyu, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20434452&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

#### **ABSTRAK**

Perusahaan perkebunan sawit terintegrasi mengolah perkebunan dari bibit menjadi Tandan Buah Segar, hingga menjadi Palm Oil. Tandan Buah Segar merupakan barang strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN menurut Peraturan Pemerintah, sedangkan Palm Oil merupakan barang yang dikenakan PPN. Pengkreditan PPN Masukan atas Tandan Buah Segar di perusahaan perkebunan sawit seringkali menimbulkan sengketa pajak karena beda interpretasi peraturan. Dalam laporan ini dibahas mengenai pokok permasalahan, peraturan, proses dalam pengadilan pajak serta analisis yurisprudensi sengketa PPN pada perusahaan perkebunan sawit terintegrasi serupa. Hasil perbandingan menunjukkan perusahaan perkebunan sawit yang mengalami masalah yang sama putusan pengadilannya mengarah pada putusan yang sama walaupun Indonesia tidak menganut sistem Yurisprudensi. Selain itu, pokok permasalahan adalah beda interpretasi peraturan.

<hr>

#### **ABSTRACT**

Palm Oil Company operates in cultivating palm seeds to produce fresh fruit bunches, until processed to be Palm Oil. Fresh Fruit Bunches is categorized as strategic object which is freed from VAT charges according to Government Regulations, while Palm Oil is an object charged with VAT. This has led to be the cause of VAT Dispute in the Palm Oil Company towards the recognition of crediting VAT In. This report discusses about the main problem, regulations, tax court process, and also jurisprudence analysis of the similar dispute encountered by other Integrated Palm Oil Company. The result of the comparisons of similar company show that the verdicts are leading to same directions although Indonesia is not adopting Jurisprudence System. Furthermore, the main problem causing the dispute is the different interpretation of the Government Regulations.